

**IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh :

KHAIRUL AMRI
133410221

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga Tercinta Khususnya kedua orang tua atas doa dan perhatian, bantuan, semangat dan dukungannya.
2. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku pembimbing I dan juga sebagai Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak memberikan masukan, saran dan koreksi dalam bimbingan penulisan proposal.
3. Ibu Rona Muliana, ST, MT selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, semangat, saran dan koreksi dalam bimbingan penulisan proposal.
4. Bapak Ir. H. Abdul Kudus Zaini, MT. MS Tr selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Muhamad Sofwan, ST, MT selaku sekretaris Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota.

6. Bapak dan Ibuk dosen pengajar di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Rekan dan sahabat seperjuangan Perencanaan Wilayah dan Kota atas motivasi dan kebersamaanya.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala membalas semua amal dan kebaikan kepada semua pihak terkait dalam membantu penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2020

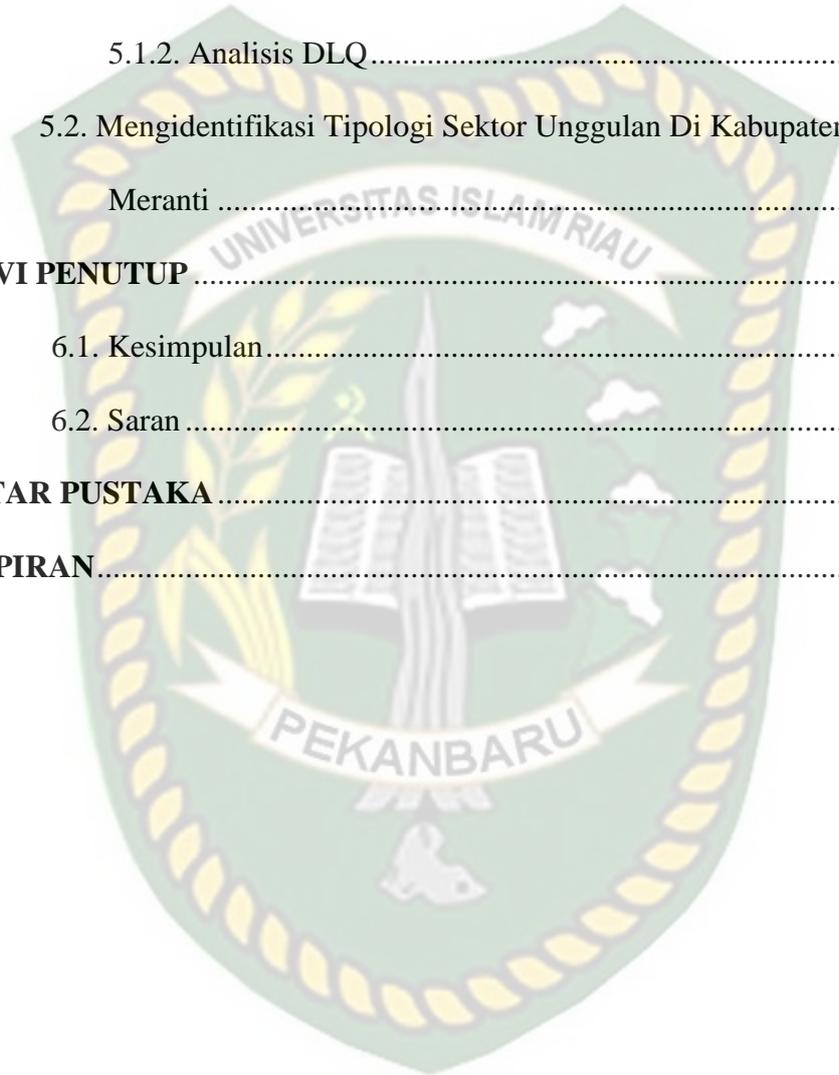
Khairul Amri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	8
1.4. Sasaran	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.7. Kerangka Pemikiran Studi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Teori Pembangunan Ekonomi.....	15
2.1.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	15
2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	17
2.2. Sektor Unggulan	24
2.2.1. Pengertian Sektor Unggulan	24
2.2.2. Tipologi Sektor Unggulan	26
2.2.3. Teori Basis Ekonomi	29
2.3. Ringkasan Teori	31

2.4. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1. Pendekatan Penelitian	39
3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Alat/Instrumen Penelitian	40
3.4. Waktu Penelitian	41
3.5. Sumber Data	41
3.6. Tahapan Penelitian	41
3.6.1. Tahap Persiapan	41
3.6.2. Tahap Pelaksanaan	42
3.6.3. Penulisan Laporan	42
3.7. Metode Analisis	42
3.7.1. Metode Deskriptif Kualitatif	43
3.7.2. Analisis LQ (<i>Location Quetiont</i>)	44
3.7.3. Analisis DLQ (<i>Dynamic Location Quetiont</i>)	46
3.9. Variabel Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	50
4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	50
4.2. Pemerintah Daerah	54
4.3. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti	55
4.4. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti	56
4.5. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)	59
4.6. Perekonomian	62

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1. Mengidentifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Meranti	70
5.1.1. Analisis LQ.....	70
5.1.2. Analisis DLQ.....	80
5.2. Mengidentifikasi Tipologi Sektor Unggulan Di Kabupaten Meranti	85
BAB VI PENUTUP	89
6.1. Kesimpulan.....	89
6.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94



IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KHAIRUL AMRI
133410221

ABSTRAK

Pembangunan di suatu daerah seharusnya dilakukan optimalisasinya pada sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan daerah tersebut. Sektor unggulan ini merupakan penggerak bagi sektor lainnya dan mempunyai keterkaitan yang sangat besar dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah di dalam pembangunan ekonomi daerah harus lebih perhatian dan fokus pada sektor unggulan daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena sektor unggulan dapat memberikan dampak secara simultan pada sektor-sektor perekonomian lainnya.

Berkaitan dengan masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, Data-data yang ditemukan dilapangan akan dijadikan sebagai data utama untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian untuk mengidentifikasi tipologi sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak mengambil kesimpulan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian Dari 17 lapangan usaha/sektor yang ada di Kabupaten meranti terdapat 3 sektor yang menjadi unggulann yaitu Kategori (A) sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan, Kategori (H) sektor Transportasi dan Pergudangan serta Kategori (O) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Berdasarkan tipologinya sektor-sektor unggulan tersebut semuanya termasuk kedalam tipe III yaitu sektor unggulan tidak prospektif.

Kata Kunci : Identifikasi, sektor unggulan, Kepulauan Meranti

IDENTIFICATION OF LEADING SECTORS IN THE MERANTI ISLAND DISTRICT

KHAIRUL AMRI
133410221

ABSTRACT

Development in an area should be optimized in sectors which are the leading sectors of the region. This leading sector is a driving force for other sectors and has a very large link with other sectors. Therefore, the government in regional economic development must be more attentive and focused on the leading sectors of the region. This is because leading sectors can have a simultaneous impact on other sectors of the economy.

In connection with the problems raised, this study uses descriptive and qualitative methods. The data found in the field will be used as the main data to identify the leading economic sectors in the Meranti Islands Regency. Then to identify the leading economic sector typologies found in the Meranti Islands District. The analytical method used in this research is descriptive qualitative method. Descriptive method is a method used to describe or analyze a research result but does not draw broader conclusions.

Based on research results From 17 business fields / sectors in Meranti Regency there are 3 leading sectors, namely Category (A), Agriculture, Forestry and Fisheries, Category (H) Transportation and Warehousing sector and Category (O) Government Administration, Defense sector and Mandatory Social Security. Based on the typology, the leading sectors are all included in type III, namely the superior sector is not proactive.

Keywords: Identification, leading sectors, Meranti island

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Teori	32
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Penafsiran Nilai <i>Location Quetiont</i> (LQ).....	45
Tabel 3.2	Kerangka Acauan Survei Data Penelitian	48
Tabel 3.3	Kerangka Acauan Survei Data Penelitian.....	49
Tabel 4.1	Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti.....	54
Tabel 4.2	PDRB Kabupaten Meranti Atas dasar Harga berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)	60
Tabel 4.3	PDRB Provinsi Riau Atas dasar Harga berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)	61
Tabel 5.1	Hasil Analisis LQ Sektor Kabupaten Meranti tahun 2018.....	73
Tabel 5.2	Rata-Rata Laju Pertumbuhan	81
Tabel 5.3	Hasil perhitungan Nilai DLQ.....	83
Tabel 5.4	Nilai Indeks/Koefisien <i>Location Quetiont</i> (LQ) dan <i>Dynamic Location Quetiont</i> (DLQ) menurut Lapangan Usaha	85
Tabel 5.5	Tipologi Sektor.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Peta Administrasi Kabupaten Meranti Provinsi Riau.....	12
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Studi.....	14
Gambar 5.1	Grafik Nilai LQ Masing-Masing sektor di Kabupaten meranti.....	74
Gambar 5.2	Grafik Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2014-2018.....	77
Gambar 5.3	Grafik Persentase Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2014-2018.....	78
Gambar 5.4	Grafik Persentase Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2014-2018.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Allah SWT menegaskan bumi dihamparkannya beserta seluruh isinya diperuntukkan buat semua manusia, mukmin atau kafir. Oleh sebab itu, karena ia diperuntukkan buat seluruh manusia, bukan terbatas hanya pada satu generasi saja, tidak dibenarkan untuk melakukan monopoli terhadap kekayaan alam semesta. Manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan alam dan isinya untuk menopang kehidupannya. Tidak itu saja, Allah SWT juga telah menundukkan (*taskhir*) alam ini buat kemudahan bagi manusia dalam menggali dan mengolahnya. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah: 164, Allah SWT berfirman :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala

jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Yulianita, 2009).

Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan masing-masing daerah (Mailendra, dkk, 2018:8). Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pengaturan sumber daya diarahkan guna memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menuju masyarakat yang madani. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Kurniawan, 2016).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004).

Sejalan dengan paradigma *endowment development* strategy bahwa salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah jika pembangunan tersebut dilaksanakan sejalan dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Artinya pembangunan dilaksanakan terutama dengan berbasiskan pada apa yang dimiliki sendiri sehingga bagian terbesar dari hasil-hasil pembangunan juga kembali ke daerahnya sendiri (Chandra dan Amiruddin, 2015:2).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan perusahaan baru. Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk laju pertumbuhan yang ada. Namun di pihak lain harus diakui bahwa menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena (Chandra dan Amiruddin, 2015:2).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem otonomi daerah menggantikan sistem sentralistik. Menurut Tarigan dalam Sapriadi dan Hasbiullah (2015) bahwa dengan kondisi yang demikian, maka masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Menurut Tarigan (2005) bahwa masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki

keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Menurut Rachbini (2001) bahwa ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Potensi daerah satu dengan daerah lainnya pasti berbeda-beda, karena hal ini terkait dengan karakteristik masing-masing daerah tersebut. Sehingga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Diperlukan pengembangan sektor-sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bila membandingkan pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya

bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat.

Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Kepulauan Meranti yang pertumbuhan laju ekonominya yang lambat di Provinsi Riau. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diketahui dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan untuk Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki PDRB yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2017).

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Majunya perekonomian suatu daerah diukur menggunakan pertumbuhan ekonominya atau perkembangan jumlah PDRB, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. Diperlukan pengembangan sektor sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi regional perlu adanya keseimbangan dan keserasian yang ideal antara berbagai sektor yang ada. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa (Irawati, 2016).

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya angka PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang dihasilkan oleh suatu daerah (Yulianita, 2009).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, sektor unggulan kabupatennya adalah sebagai berikut: 1). Industri pengolahan, 2). Konstruksi, 3). Transportasi, pergudangan, dan pariwisata, 4). Jasa pendidikan, 5). Pertanian, 6). Perdagangan dan pariwisata. Pemilihan sektor-sektor tersebut didorong oleh sifat sektor-sektor tersebut yang padat tenaga kerja dan berpotensi besar menyerap tenaga kerja (BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016).

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi peringkat tertinggi dengan kontribusi sebesar 32,07 % dan diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan sebesar 28,09 % dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 18,30 %. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,84 %. Tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan gambaran bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai ciri dari suatu daerah yang mulai berkembang. Namun demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti ini berkembang secara pesat, disisi lain Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong kedalam kategori daerah yang masih tertinggal. Hal ini mendorong perlunya sebuah perencanaan yang matang dalam pengembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meninggalkan posisi daerah tertinggal (Hidayat dan Darwin, 2017).

Rendahnya PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi secara maksimal. Diperlukan pengembangan sektor sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembangunan di suatu daerah seharusnya dilakukan optimalisasinya pada sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan daerah tersebut. Sektor unggulan ini merupakan penggerak bagi sektor lainnya dan mempunyai keterkaitan yang sangat besar dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah di dalam pembangunan ekonomi daerah harus lebih perhatian dan fokus pada sektor unggulan daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena sektor unggulan dapat memberikan dampak secara simultan pada sektor-sektor perekonomian lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya penelitian tentang identifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memanfaatkan setiap potensi daerahnya yaitu pada optimalisasi sektor unggulan daerah tersebut. Dengan demikian diharapkan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang ada pada latar belakang permasalahan sehubungan dengan identifikasi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab rendahnya PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimanakah perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apa saja sektor-sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Apa saja tipologi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mengidentifikasi tipologi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah
Dapat menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal strategi meningkatkan pengelolaan sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagi akademi
Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan mejadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang peningkatan pengelolaan sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini menjelaskan tentang ruang wilayah dan ruang lingkup materi dalam penelitian. Adapun ruang lingkup wilayah yaitu wilayah yang menjadi lokasi penelitian sedangkan ruang lingkup materi berupa materi-materi yang akan dibahas ataupun batasan materi dalam tugas akhir ini.

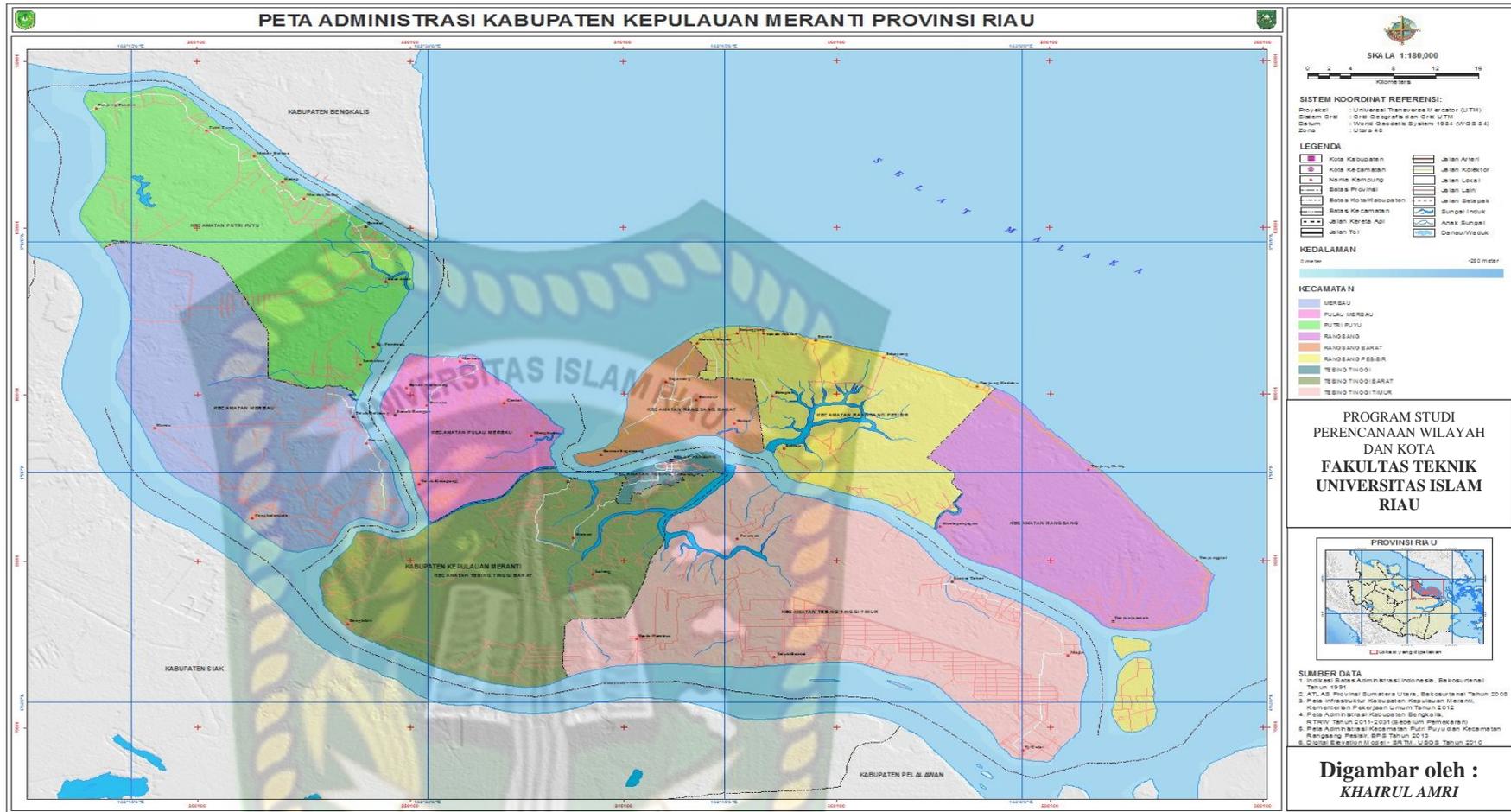
1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam-Tj. Balai Karimun.

Luas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang yang merupakan ibuk kota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 45,44 km². Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Untuk melihat lebih jelasnya batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti berikut ini.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Meranti Provinsi Riau

1.6.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi ini dimaksudkan untuk menjelaskan materi yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Langkah awal analisis penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi sektor unggulan dan tipologi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan metode *Location Quetiont* (LQ) dan *Dynamic Location Quetiont* (DLQ).

Perhitungan nilai LQ dilakukan pada masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah penelitian dan pada masing-masing sektor unggulan. data yang digunakan ialah data PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yang telah dikoenversi dalam rupiah. Adapun nilai rupiah yang digunakan adalah kontribusi masing-masing sektor PDRB kecamatan tersebut dibagi atas kontribusi masing-masing sektor PDRB kabupaten. Sedangkan perhitunga analisa DLQ hampir sama penggunaannya dengan menggunakan data PDRB dari masing-masing kecamatan, namun yang menjadi pembeda ialah analisa DLQ menggunakan range waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2014-2018.

1.7. Kerangka Pemikiran Studi

Kerangka pemikiran studi merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel dan analisis yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis. Kerangka pemikiran studi ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Berikut adalah kerangka kerangka pemikiran studi peneliti.



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Studi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi

2.1.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2010) bahwa pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suparmako (2010) bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Menurut Tan (2014) bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan pendapatan perkapita identik dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2015) bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi

proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Schumpeter dalam Suryana (2004) bahwa pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan pembangunan menurut Gant ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya (Sirojuzilam, 2008).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Pembangunan ekonomi adalah

upaya untuk mengatasi masalah-masalah negara terbelakang dengan suatu kegiatan yang menyangkut proses ekonomi dan politik untuk mendorong terjadinya perubahan struktur produksi dan institusional lebih cepat dan lebih baik bagi masyarakat (Amir, 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013). Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Todaro, 2010).

2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2015).

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut, amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks inilah pentingnya merumuskan visi dan misi dan kemudian memilih strategi yang tepat (Kuncoro, 2004).

Tujuan inti pembangunan adalah sebagai berikut (Todaro, 2010):

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemausiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Aryad, 2015):

- a) Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
- b) Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi *ekspor* akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun *ekspor* (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat

menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

- c) Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.
- d) Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
- e) Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai *backwash effects*.
- f) Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut (Adisasmita, 2014):

a) Ketidakseimbangan pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 % populasi terbawah akan menerima 80 % dari total pendapatan, sedangkan 20 % populasi teratas menerima 20 % total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 % populasi terendah, 40 % populasi sedang, dan 20 % populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b) Perubahan struktur perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c) Pertumbuhan kesempatan kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat

pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d) Tingkat dan penyebaran kemudahan

Dalam hal ini kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

e) Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan-penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Khusaini, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran wirausaha (*enterprenuer*), koordinator, fasilitator dan stimulator. Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah, bangunan, untuk tujuan konservasi atau alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk tujuan perencanaan pembangunan. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi pembangunan didaerahnya, bekerjasama dengan badan usaha dan kelompok masyarakat lainnya. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku didaerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada didaerah tersebut, demikian juga berbagai macam fasilitas untuk menarik pengusaha masuk ke daerah (Kuncoro, 2004).

Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 2015).

Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit (Arsyad, 2015).

2.2. Sektor Unggulan

2.2.1. Pengertian Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang

sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001).

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo, 2002).

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000).

2.2.2. Tipologi Sektor Unggulan

Klasifikasi sektor unggulan dapat menggunakan metode Analisis *Tipologi Klassen* yang menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda, yaitu (Sjafrizal, 2008:180):

- 1) Klasifikasi I : Sektor maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*), bila nilai $s_i > s$ dan $s_{ki} > s_k$
- 2) Klasifikasi II : Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*), nilai $s_i < s$ dan $s_{ki} > s_k$
- 3) Klasifikasi III : Sektor potensial masih dapat berkembang (*developing sector*), nilai $s_i > s$ dan $s_{ki} < s_k$
- 4) Klasifikasi IV : Sektor relative tertinggal (*underdeveloped sector*), dimana nilai $s_i < s$ dan $s_{ki} < s_k$

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu (Rachbini, 2001) :

- a) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
- b) Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
- d) Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sektor unggulan memiliki empat kriteria diantaranya: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo, 2002).

Kriteria mengenai sektor unggulan daerah, di antaranya adalah (Ambardi dan Prihawantoro, 2002):

- 1) Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- 2) Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
- 3) Komoditas unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
- 4) Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan
- 5) bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
- 6) Komoditas unggulan memiliki status teknologi (*state of the art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
- 7) Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
- 8) Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki

tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.

- 9) Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
- 10) Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluan pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
- 11) Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Di dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut (Mulyanto, 2008):

- 1) Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
- 2) Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
- 3) Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.
- 4) Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
- 5) Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
- 6) Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
- 7) Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.

- 8) Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional.

2.2.3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2015). Menurut Hoover dan Giarratani dalam Sirojuzilam (2008) bahwa beberapa aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah secara khusus merupakan aktivitas-aktivitas basis ekonomi, yaitu dalam arti pertumbuhannya memimpin dan menentukan perkembangan wilayah secara keseluruhan, sementara aktivitas-aktivitas lainnya yang non basis adalah secara sederhana merupakan konsekuensi dari keseluruhan perkembangan wilayah tersebut. Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan wilayah.

Menurut Glason dalam Sirojuzilam (2008) bahwa aktivitas-aktivitas basis adalah aktivitas-aktivitas yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian wilayah yang bersangkutan atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan aktivitas-aktivitas non basis adalah aktivitas-aktivitas yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu cara dalam menentukan suatu sektor sebagai sektor basis atau non-basis adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Teknik *Location Quotient* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu (Arsyad, 2015):

- a) Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
- b) Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis).

Analisis *LQ* digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari segi produksinya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kegiatan basis dan bukan basis, diantaranya adalah teknik *LQ*. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Dalam teknik *LQ* pengukuran dari kegiatan ekonomi secara relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja. Analisis *LQ* juga dapat digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari sisi produksinya.

2.3. Ringkasan Teori

Ringkasan teori adalah rangkuman dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini ringkasan teori yang disajikan yaitu teori-teori tentang identifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun teori-teori tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1
Ringkasan Teori

No	Sub bab	Teori	Sumber	Tahun	Keterangan
1.	Teori pembangunan ekonomi	Pengetian pembangunan ekonomi	Suparmako	2010	Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.
		Pengertian pembangunan ekonomi daerah	Arsyad	2015	Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah
		Indikator pertumbuhan ekonomi wilayah	Adisasmita	2014	Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut: a) Ketidakseimbangan pendapatan b) Perubahan struktur perekonomian c) Pertumbuhan kesempatan kerja d) Tingkat dan penyebaran kemudahan e) Produk Domestik Regional Bruto

2	Sektor Unggulan	Pengertian sektor unggulan	Sambodo	2002	Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah.
		Kriteria penentuan sektor unggulan	Rachbini	2001	Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut. b) Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas. c) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah. d) Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.
		Teori basis ekonomi	Arsyad	2015	Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu mengenai identifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar Kabupaten Kepulauan Meranti., yang antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 2.2
Keaslian dan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fachrurrazy	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB	2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara . 2. Untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara. 3. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara 4. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Analisis <i>Tipologi Klassen</i> 6. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> 7. Analisis <i>Shift Share</i> 	Sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan kompetitif, yaitu sector pertanian. Sub sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai sub sektor unggulan, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sector tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan sub sektor perikanan.

2.	Hidayat dan Rima dewi	Identifikasi Sub Sektor Unggulan Kecamatan di Lombok Tengah	2014	1. Untuk mengidentifikasi Sub Sektor Unggulan Kawasan Strategis Kecamatan Kabupaten Lombok	2. LQ 3. DLQ	Hasil perhitungan LQ dan DLQ untuk mencari sub sektor unggulan di kawasan strategis kecamatan Kab. Lombok Tengah antara lain ialah sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. Oleh karena itu, setelah didapatkannya sub sektor unggulan di kawasan strategis kecamatan di Kab. Lombok Tengah diharapkan dapat membantu fokus pengembangan sub sektor agar tepat sasaran pada sub sektor yang mempunyai potensi berkembang dengan baik
3.	Basuki, dkk	Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode <i>Shift Share</i> dan <i>Location Quotient</i>	2017	1. Untuk mengidentifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode <i>Shift Share</i> dan <i>Location Quotient</i>	2. <i>Shift Share</i> 3. <i>Location Quotient</i>	1 Sektor unggulan Kabupaten Sleman ada empat sektor yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estate, dan sektor jasa perusahaan. 2 Sektor terbelakang Kabupaten Sleman ada lima sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran;

						reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
4.	Mangilaleng, dkk	Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan	2015	1. Untuk mengidentifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan	2. <i>Shift Share</i> 3. <i>Location Quotient</i>	1 Dari hasil perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ) sektor unggulan yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan diikuti dengan sektor industri, sektor non unggulan yaitu sektor listrik dan gas, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan, sektor perdagangan, dan dengan sektor jasa perusahaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan menurut perhitungan LQ di karenakan wilayah Minahasa Selatan mempunyai potensi pertambangan baik pertambangan emas, pasir, besi, belerang, batu dan sirtu, lempung, tras, batu kapur dan kaolin yang sangat di perlukan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat di perlukan dan bisa di ekspor untuk mendorong sektor pertambangan menjadi sektor unggulan. 2 Dari hasil perhitungan <i>Shift Share</i> yang memberikan daya saing terbesar



						<p>di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor konstruksi. Sektor pertanian berdasarkan hasil <i>shift share</i> mempunyai keunggulan kompetitif di karenakan terjadi peningkatan absolut dari sektor pertanian. Hal itu bisa dilihat dengan hasil <i>Shift Share</i> dimana perekonomian sektor pertanian termasuk di unggulan dan menjadi pendorong kinerja perekonomian daerah.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisa, 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu metode untuk menelaah, mengenai esensi, mencari makna di balik frekuensi dan variansi (Yunus, 2010). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif sebagai strategi penelitian yang menekankan pada interpretasi terhadap data yang di temukan dilapangan dan mengeskporasi temuan-temuan lapangan sebagai pola pikir dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif memiliki alasan yang sah untuk mengembangkan tolak ukurnya sendiri guna menaksir keberhasilan relatif dari praktek empirisnya (Alwasilah, 2012).

Data-data yang ditemukan dilapangan akan dijadikan sebagai data utama untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian untuk mengidentifikasi tipologi sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pendekatan ini juga dipilih karena permasalahan penelitian bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada fenomena tersebut diambil dengan penggunaan tes, atau kuesioner yang merupakan inti dari pendekatan kuantitatif (Sugiono, 2013). Dalam penelitian kualitatif, analisis lebih ditekankan pada upaya mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan proses, bukan produk.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan pemilihan tempat penelitian ini yaitu pada Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan laju ekonominya lambat di Provinsi Riau. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diketahui dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan untuk Provinsi Riau yang berada pada posisi terendah dibandingkan dengan daerah lainnya yang terdapat di Provinsi Riau. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan sector unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.3 Alat/Instrumen Penelitian

Terdapat berbagai alat dan instrument penelitian yang dapat menunjukkan keberhasilan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Peta lokasi amatan atau foto udara untuk memudahkan kegiatan *grand tour* dan pengenalan lokasi amatan. Peta lokasi juga berfungsi untuk media perekam peristiwa spasial yang telah berubah dari keadaan eksitingnya. Dalam *grand tour* ini, dilakukan pengamatan awal Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Peralatan untuk merekam atau mendokumentasikan gambar, video kegiatan dan momen-momen penting selama melakukan observasi lapangan, seperti kamera *dgital* dan *hendycam*. Dalam hal ini dilakukan perekaman gambar mengenai identifikasi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Daftar *check list* untuk memudahkan dalam mengecek data apa saja yang masih kurang, berupa tema-tema tertentu yang akan dicari dilapangan.

4. *Log book* atau catatan pendokumentasian data dan informal yang didapat dari lapangan/*grand tour*, wawancara, dan juga internet yang terkait dengan fenomena identifikasi sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Alat olah digital berupa digital berupa komputer atau laptop. beserta *software-software* pendukung seperti Ms.Word, Ms.Excel, dan lain sebagainya.

3.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder Merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung baik diperoleh dari instansi-instansi terkait yang memiliki kumpulan data tertulis maupun mengakses dari situs-situs tertentu di internet. Data skunder yang didapat di sini adalah berupa dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti, PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti, serta data-data kependudukan dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.6 Tahap Penelitian

3.6.1 Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyusunan rencana penelitian berupa *background knowledge* sebagai pembekalan awal sebelum melaksanakan penelitian, kemudian rumusan

masalah, tujuan penelitian, hingga metode apa yang akan dipakai untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan penelitian.

2. Penentuan lokasi amatan agar lebih efektif dan efisien saat melakukan kegiatan lapangan, meliputi rute perjalanan, lama perjalanan, dan sebagainya.
3. Mengurus surat-surat perizinan terkait.
4. Orientasi data skunder yang didapat.

3.6.2 Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah:

1. *Collecting* data sekunder.
2. Analisis dan olah data.

3.6.3 Penulis Laporan

Penulisan laporan ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jenis laporan tertulis, berupa laporan penelitian.
2. Membuat struktur laporan penelitian yang intinya terdiri dari Bab I - Bab VI
3. Penulisan laporan penelitian berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan.
4. Penulisan kesimpulan dan rekomendasi penelitian

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak mengambil kesimpulan yang lebih luas.

3.7.1 Metode Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif

Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat yang mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiono, 2013).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola) dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian kualitatif instrumentnya adalah orang atau *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasisosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisa yang dilakukan bersifat deskriptif, dimana fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian didistribusikan menjadi hipotesis satu teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk beberapa kepentingan yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bila masalah penelitian belum jelas, maka metode kualitatif ini cocok dikarenakan peneliti kualitatif akan langsung masuk keobyek, melakukan penjelajahan sehingga masalahakan dapat ditemukan dengan jelas.
- b. Untuk mengembangkan teori, yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan.
- c. Untuk memastikan kebenaran data, melalui teknik pengumpulan data secara trigulasi atau gabungan maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu dengan metode kualitatif, data yang diperolehakan di uji kredibilitasnya, dan penelitian berakhir setelah data telah mencukupi maka kepastian data akan diperoleh.
- d. Meneliti sejarah perkembangan, dengan menggunakan data dokumentasi maka sejarah perkembangan tersebut akan diperoleh.

3.7.2. Analisis LQ (*Location Quetiont*)

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi dari sector basis dan non basis dapat digunakan metode LQ (*Location Quetiont*), yang merupakan perbandingan relative antara kemampuan sektor yang sama pada wailayah yang lebih luas. Asumsi dalam LQ adalah terdapat sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografi dan produktifitas tenaga kerja seragam serta masing-masing industry menghasilkan produk atau jasa yang seragam (Rustiandi, dkk, 2011).

Adapun rumus LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV}$$

Keterangan:

LQ_{ij} = Indeks *Location Quetiont* sektor i di kabupaten j

X_{ij} = PDRB sektor i kabupaten/kota j

RV_j = Total PDRB di kabupaten/kota j

X_i = PDRB sektor i di Provinsi (acuan)

RV = Total PDRB di Provinsi (acuan)

Interpretasi LQ menurut Muta'ali (2015) berdasarkan prinsip perbandingan pada formula di atas, maka semakin tinggi nilai LQ suatu sektor, semakin tinggi pula *comparative advantage* daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut. Analisis LQ selalu dikaitkan dengan dua hal yang saling berhubungan yaitu penafsirannya untuk mengidentifikasi sektor basis/sektor unggulan dan tingkat spesialisasi tertentu. Interpretasi hasil penilaian LQ adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Penafsiran Nilai *Location Quetiont* (LQ)

Nilai LQ	Penafsiran*)		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	Tingkat Spesifikasi	Pelayanan Pasar
$LQ > 1$	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisai	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
$LQ < 1$	Sektor non basis, non unggulan dan tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah

LQ = 1	Penafsiran*)		
	Spesialisasi sama dengan daerah acuan	Spesialisasi sama dengan daerah acuan	Non ekspor, hanya mampu melayani pasar didalam wilayah

Kelebihan dan kekurangan analisis *Location Quotient* (LQ) adalah (Putra 2010) :

- a. Kelebihan : penerapan metode ini sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengelolaan data yang rumit.
- b. Kekurangan : (1) Metodenya yang sederhana, maka dituntut adanya keakuratan data. Sebaik apapun hasil analisis LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu sebelum memutuskan menggunakan alat analisis LQ maka diperlukan validitas data terlebih dahulu. (2) kelemahan dalam deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil perhitungan LQ terkadang tidak sama dengan dugaan. Misalnya suatu wilayah provinsi yang diduga memiliki keunggulan disektor non pangan, yang muncul dari hasil analisis LQ malah sektor pangan dan sebaliknya.

3.7.3. Analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

Secara umum LQ terbagi atas dua macam yaitu SLQ (*Static Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*). DLQ sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan SLQ, hanya mengintroduksikan laju pertumbuhan

digunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) sampai tahun (t).

Adapun rumus DLQ adalah sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)}$$

Sumber: Muta'ali, 2015

Keterangan:

DLQ_{ij} = Indeks *Dynamic Location Quetiont* sektor i di kabupaten j

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor atau sub sektor i di kabupaten/kota j

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di kabupaten/kota j

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di tingkat Provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi

t = kurun waktu analisis

Kemungkinan nilai DLQ yang diperoleh ialah:

1. $DLQ > 1$: Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (j) lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah referensi.
2. $DLQ < 1$: Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (j) lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah referensi.

3. $DLQ = 1$: Proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (j) sebanding dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah referensi.

3.7.4. Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Menurut Muta'ali (2015) bahwa analisis gabungan LQ dan DLQ ini untuk mengetahui terjadinya pergeseran dan reposisi serta menilai prospek keberadaan sector ekonomi wilayah pada masa yang akan datang. Pada analisis gabungan LQ dan DLQ tipologi sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ dibagi atas 4 tipe yaitu dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.

Tipologi Sektor Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ

	DLQ > 1	DLQ < 1
LQ > 1	Tipe I Sektor basis, prospektif	Tipe III Sektor basis, tidak prospektif
LQ < 1	Tipe II Sektor non basis, prospektif	Tipe IV Sektor non basis, tidak prospektif

Sumber: Teknik analisis regional, (Muta'ali, 2015).

3.8 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Kerangka Acauan Survei Data Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Sasaran penelitian	Variabel Data	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Analisa
1.	Mengidentifikasi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.	Teridentifikasi sektor ekonomi unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.	a. PDRB Provinsi. b. PDRB Kabupaten Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)	Data sekunder	Badan Pusat Statistik	a. Deskriptif kualitatif b. Deskriptif c. LQ d. DLQ
2	Mengidentifikasi tipologi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.	Teridentifikasi tipologi sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.	a. PDRB Provinsi. b. PDRB Kabupaten Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)	Data sekunder	Badan Pusat Statistik	Analisis gabungan LQ dan DLQ

Sumber : Hasil Analisis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti 3707,84 km².

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river levees yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu

masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti. Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten Kepulauan Meranti. Yaitu Islam 160,585 jiwa, Kristen 12,370 jiwa, Katolik 168 jiwa, Budha 23,961 jiwa, Konguchu 1,374 jiwa, dan Hindu 75 jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di kabupaten kepulauan meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minang kabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. Sebagai Kabupaten kepulauan.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penompang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik

sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

4.2 Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara Administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9

Kecamatan dan 101 desa/Kelurahan, yaitu :

Tabel 4.1 : Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan (Km ²)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	849.50	9	76.763
2	Tebing Tinggi	Alai	586.83	11	15.126
3	Rangsang	Tanjung Samak	681.00	17	28.106
4	Rangsang Barat	Bantar	241.60	16	29.770
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348.91	14	47.370
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	765.987	7	13.987
7	Tebing Tinggi	Sungai Tohor	804.06	7	25.887
8	Putri Puyu	Bandul	847.540	10	17.919
9	Rangsang Pesisir	Sonde	761.87	10	10.778

Sumber : *Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018*

Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Dan jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

4.3 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, betenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk pertanian sendiri Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi yaitu 2,523 ha; Jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10; demikian pula dibidang perkebunan, untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

Serta untuk dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk di perternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak, hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha

dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti

4.4 Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu merekul-turisasi masyarakat dengan budaya Melayu Islami. misalnya, dengan berpakaian berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah-sekolah, anak-anak didik harus dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atas-nya Selembayung.

Dalam tugas dan amanah mempertahankan dan menanamkan budaya Melayu Islami di bumi Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah harus

bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah mewabah. Tetapi perlu disadari bersama, bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri.

Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi bu-daya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan, Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan di daerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri,

agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

4.5 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah dalam tahun tertentu. PDRB Kabupaten Meranti Menurut Lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha atau sektor. Pemecahan menjadi sebkategori atau golongan ini sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan dibawah ini beserta PDRB provinsi Riau sebagai wilayah acuan.

Tabel 4.2
PDRB Kabupaten Meranti Atas dasar Harga berlaku
Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)

	Sektor	Tahun (Rp milyaran)				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4758,30	5246,45	5835,99	6184,74	6386,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4550,07	3367,13	3162,47	3035,96	3923,57
C	industri Pengolahan	3223,62	3610,23	3881,13	4152,37	4288,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,57	6,44	7,19	7,59
E	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,48	0,60	0,66	0,69	0,70
F	konstruksi	616,54	655,35	711,26	767,14	847,93
G	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1119,64	1315,67	1438,76	1528,70	1632,06
H	transportasi dan pergudangan	308,99	347,92	367,66	386,90	404,13
I	penyediaan akomodasi dan makan minum	39,35	43,94	46,95	49,11	52,20
J	informasi dan komunikasi	71,89	81,79	84,60	90,19	95,73

	Sektor	Tahun (Rp milyaran)				
		2014	2014	2014	2014	2014
K	jasa keuangan dan asuransi	43,31	45,45	48,24	50,15	52,80
L	real estate	53,77	62,26	68,27	72,46	75,54
MN	jasa perusahaan	0,39	0,45	0,51	0,54	0,57
O	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	263,85	286,95	299,41	307,97	316,56
P	jasa pendidikan	27,42	32,35	36,12	37,79	39,91
Q	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,51	10,71	11,13	11,57	12,10
RSTU	jasa lainnya	37,78	39,81	44,52	47,51	50,57
	Jumlah	15127,08	15151,63	16044,09	16730,96	18186,45

Sumber : PDRB Kabupaten Meranti menurut lapangan usaha, 2018

Tabel 4.3
PDRB Provinsi Riau Atas dasar Harga berlaku
Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Dalam Milyar Rupiah)

	Sektor	Tahun (Rp milyaran)				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	133.550,01	144.218,91	156.234,41	165.933,35	169.487,75
B	Pertambangan dan Penggalian	268.819,88	201.796,80	191.970,57	182.685,67	210.105,12
C	Industri Pengolahan	141.874,68	155.685,92	168.241,90	178.829,42	185.241,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	230,37	310,74	396,11	443,60	469,06
E	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	65,79	72,06	75,56	80,95	80,99
F	Konstruksi	45.437,97	51.673,30	56.999,52	61.696,54	66.920,49
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	52.868,66	57.952,65	63.956,78	69.033,80	74.068,45
H	Transportasi dan pergudangan	4.457,96	5.185,48	5.640,18	6.039,48	6.429,89
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.163,31	3.342,15	3.609,92	3.816,22	4.059,89

	Sektor	Tahun (Rp milyaran)				
		2014		2014		2014
J	Informasi dan komunikasi	3.539,38	4.077,41	4.371,22	4.753,08	5.105,78
K	jasa keuangan dan asuransi	5.430,50	5.664,92	6.141,36	6.154,33	6.790,18
L	real estate	4.658,53	5.404,85	5.790,84	6.085,29	6.396,20
MN	jasa perusahaan	28,44	32,29	34,52	38,03	41,82
O	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9.246,79	10.076,89	10.392,91	10.665,03	10.939,25
P	jasa pendidikan	2.760,17	3.267,19	3.459,15	3.647,67	3.870,98
Q	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	955,16	1.176,04	1.224,30	1.314,85	1.417,90
RSTU	jasa lainnya	2.308,28	2.824,03	3.159,78	3.480,27	3.848,89
	total	679.395,85	652.761,62	681.699,03	704.697,58	755.274,28

Sumber : PDRB Provinsi Riau menurut lapangan usaha, 2018

4.6. Perekonomian

4.6.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala kegiatan usaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau arang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Termasuk didalamnya kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

3. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

4.6.2. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan

minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

4.6.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

4.6.3. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

4.6.4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

4.6.5. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

4.6.6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

4.6.7. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

4.6.8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

4.6.9. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

4.6.10. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

4.6.11. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung,

pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

4.6.12. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung perasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

4.6.13. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan,

pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

4.6.14. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dap disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

4.6.15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan

pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

4.6.16. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Mengidentifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Meranti

Untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Meranti digunakan analisis LQ dan DLQ. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sector unggulan pada tahun 2018 dan analisis DLQ digunakan untuk mengetahui sektor pada tahun 2014-2018, namun dalam mengidentifikasi sektor unggulan dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sektor unggulan hasil analisis LQ sedangkan analisis DLQ digunakan untuk menentukan tipologi dari sektor unggulan tersebut.

5.1.1. Analisis LQ

Menurut Arsyad (1999), teknik analisis *Location Quotient* (LQ) ini bertujuan untuk menentukan kapasitas ekspor dari perekonomian daerah dan melihat kemampuan memenuhi kebutuhan atau *self-sufficiency* dari suatu sektor. Analisis ini membandingkan sektor yang ada pada Kabupaten Meranti dengan sektor yang ada pada Provinsi Riau.

Metode ini juga digunakan untuk mengetahui apakah sektor pertambangan dan penggalian pada setiap kabupaten/kota di Pulau Sumbawa termasuk dalam golongan sektor basis atau non basis dengan kriteria:

- a. Jika nilai $LQ=1$, maka tingkat spesialisasi pada sektor “i” di kota/kabupaten di Kabupaten Meranti sama dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Riau.
- b. Jika nilai $LQ>1$, maka tingkat spesialisasi sektor “i” di kota/kabupaten

di Kabupaten Meranti lebih besar dibanding dengan sektor yang sama di Provinsi Riau. Dengan kata lain sektor tersebut dapat dikatakan sektor basis yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Meranti serta dapat dikembangkan.

- c. Jika nilai $LQ < 1$, maka tingkat spesialisasi sektor “i” di kota/kabupaten di Kabupaten Meranti lebih kecil dibanding dengan sektor yang sama di Provinsi Riau. Dengan kata lain sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis yang kurang berpotensi sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Meranti.

Pada analisis LQ ini digunakan *software Microdoft Excel* untuk memudahkan perhitungan. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Meranti dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau pada tahun 2018 atas dasar harga yang berlaku.

Adapun rumus Analisis *Location Quetiont* adalah :

$$LQ_{ij} = \frac{\frac{X_{ij}}{RV_j}}{\frac{X_i}{RV}}$$

Dinana :

LQ_{ij} = Indeks *Location Quetiont* sektor i di kabupaten j

X_{ij} = PDRB sektor i kabupaten/kota j

RV_j = Total PDRB di kabupaten/kota j

X_i = PDRB sektor i di Provinsi (acuan)

RV = Total PDRB di Provinsi (acuan)

Dilihat dari rumus tersebut maka jika nilai LQ dihitung dengan cara manual yaitu LQ untuk sektor/ Kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Diketahui

$$X_{ij} = 6.386.193,5$$

$$RV_j = 18.185.485,9$$

$$X_i = 169.487.751,11$$

$$RV = 755.274.285,01$$

Maka nilai LQ untuk sektor/ Kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

$$LQ_{(A)Pertanian,Kehutanan\ dan\ Perikanan} = \frac{\frac{6.386.193,5}{18.185.485,9}}{\frac{169.487.751,11}{755.274.285,01}}$$

$$LQ_{(A)Pertanian,Kehutanan\ dan\ Perikanan} = \frac{0,351151}{0,224406}$$

$$LQ_{(A)Pertanian,Kehutanan\ dan\ Perikanan} = 1,564805$$

Perhitungan manual ini dilakukan untuk perbandingan dan sebagai kontrol hasil perhitungan. Penentuan hasil LQ digunakan hasil perhitungan dengan menggunakan *software Microsoft Excel* karena lebih mudah dan hasilnya lebih akurat karena *decimal* nilai masing-masing terinput secara otomatis, namun kelemahannya yaitu jika terjadi kesalahan input data dan menerjemahkan rumus akan menyebabkan hasil yang salah dan menyeluruh pada setiap perhitungan.

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

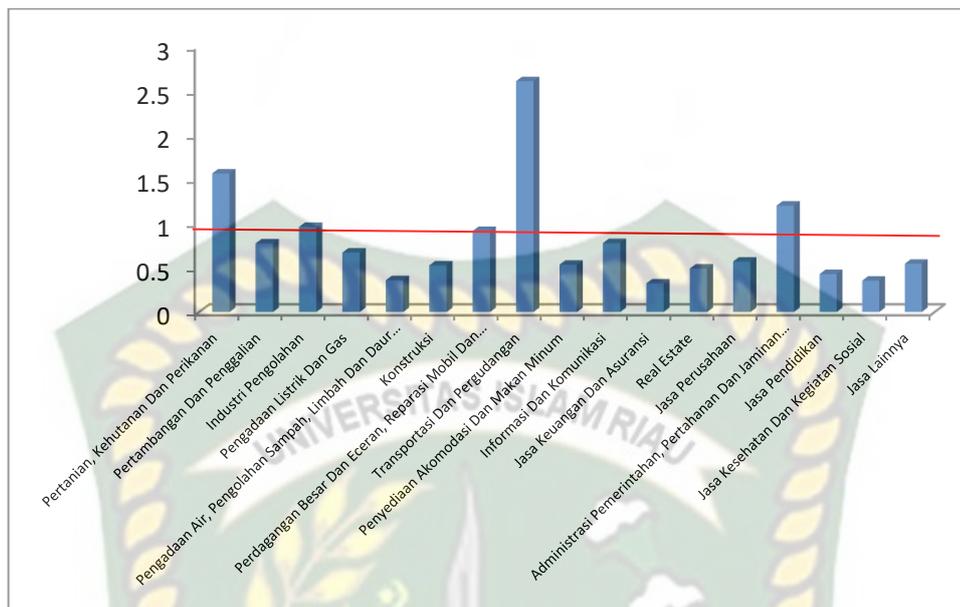
- Input manual data PDRB Provinsi Riau dan Kabupaten Meranti atas dasar harga yang berlaku tahun 2014-2018 (dalam milyar rupiah)
- Kemudian buat tabel untuk hasil analisis LQ dengan variable yang berkaitan dengan analisis LQ
- Memasukkan rumus Analisis LQ yang telah diterjemahkan kedalam *Microdoft Excel*.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut diketahui hasil Analisis LQ pada Kabupaten Meranti pada tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 5.1.
Hasil Analisis LQ Sektor Kabupaten Meranti tahun 2018

KATEGORI	SEKTOR	Tahun
		2018
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1,564805
B	Pertambangan Dan Penggalian	0,775535
C	Industri Pengolahan	0,961395
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,672228
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,359198
F	Konstruksi	0,526205
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0,915083
H	Transportasi Dan Pergudangan	2,610215
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,533986
J	Informasi Dan Komunikasi	0,778659
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	0,322955
L	Real Estate	0,490488
M,N	Jasa Perusahaan	0,569958
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1,201774
P	Jasa Pendidikan	0,428161
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,354314
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,545682

Sumber : Hasil Analisis, 2020



Gambar 5.1.
Grafik Nilai LQ Masing-Masing sektor di Kabupaten meranti
Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari tabel dan gambar diatas dapat diidentifikasi bahwa sektor unggulan yaitu sdektor-sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$, adapun sektor-sektor yang tergolong dalam sektor unggulan tersebut yaitu :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan
2. Sektor Transportasi dan Pergudangan
3. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib

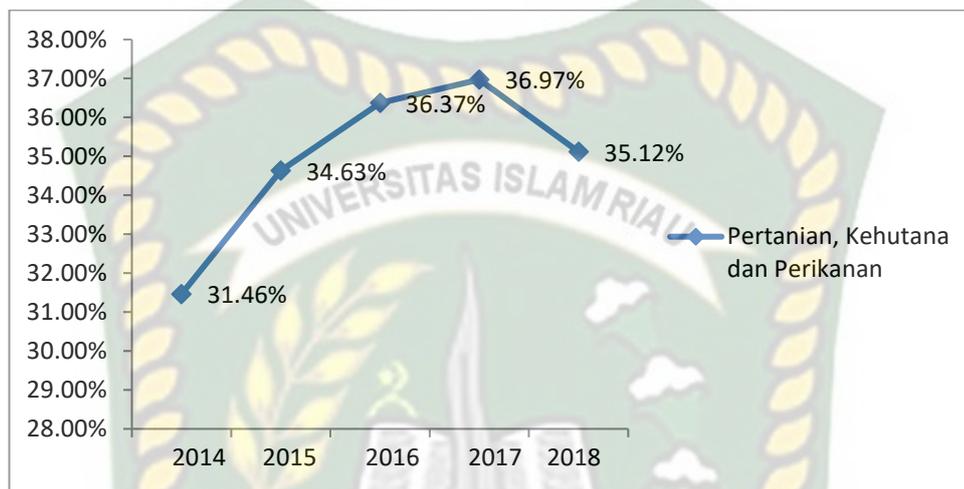
Dari sektor-sektor tersebut dapat dilihat sektor yang paling unggul adalah sektor transportasi da pergudangan dengan nilai LQ sebesar 2,610215 dan sektor unggulan dengan nilai terendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ sebesar 1,201774. Ini berarti sektor-sektor tersebut selain merupakan sektor unggulan/potensial juga mempunyai peran ekspor di wilayah Kabupaten Meranti.

Sektor non unggulan yang nilai $LQ < 1$ adalah sektor Pertambangan Dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik Dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, sektor Informasi Dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan Dan Asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial dan sektor lain-lain. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut tidak potensial dan tidak memiliki peran ekspor justru sektor tersebut berpotensi mengimpor dari daerah lain. Sektor non unggulan yang memiliki LQ mendekati angka 1 yaitu sektor industri pengolahan dengan $LQ = 0,961395$ dan nilai LQ terendah yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai $LQ = 0,322955$. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas bagaimana lingkup kegiatan serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pendapatan perekonomian Kabupaten Meranti.

a. Sektor pertanian, Kehutana dan perikanan

Sektor /Kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan dengan nilai $LQ = 1,564805$ yang berarti sektor unggulan ini memiliki peran yang besar dalam pendapatan daerah Kabupaten Meranti karena selain mampu memenuhi kebutuhan lokal juga memiliki peran ekspor ke wilayah lainnya. Sektor/Kategori Pertanian, Kehutana dan perikanan ini terdapat tiga pembagian golongan pokok yaitu (01) pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. golongan pokok ini terbagi lagi dalam beberapa golongan yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman

perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. (2) kehutana dan penebangan kayu dan (03) perikanan. Kabupaten Meranti rata – rata penduduknya bekerja disektor.



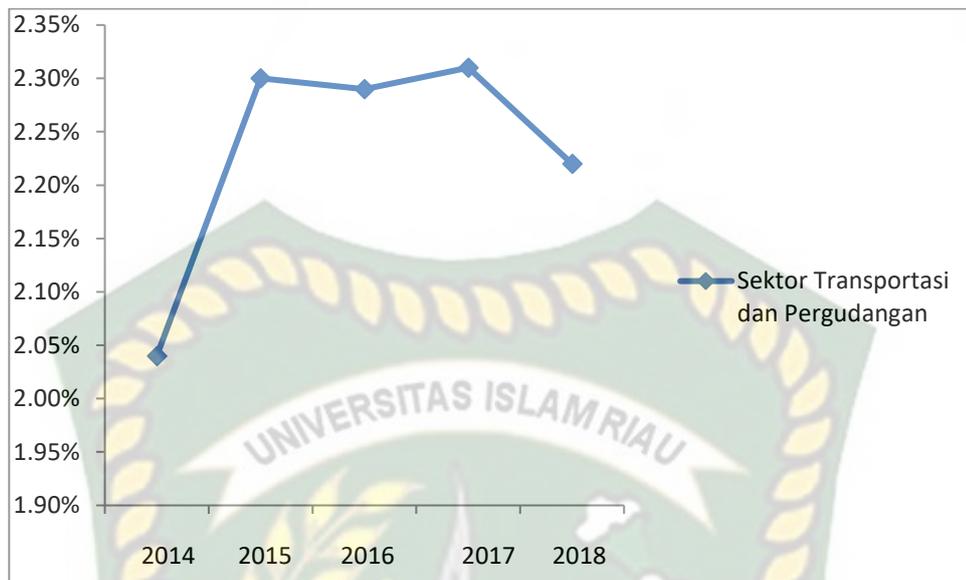
Gambar 5.2.
Grafik Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2014-2018

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari grafik kontribusi diatas diketahui bahwa kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Meranti pada tahun 2014 sebesar 31,46% naik pada tahun 2015 menjadi 36,61% yang kemudian naik lagi pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebesar 36,37% dan 36,97%. Kontribusi sector Pertanian, Kehutanan dan Perikana pada tahun 2018 menurun menjadi 35,12 % dimana terjadi penurunan sebesar 1,85%.

b. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor/Kategori (H) Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor unggulan dengan nilai LQ = 2,610215 yang berarti sektor unggulan ini memiliki peran yang besar dalam pendapatan daerah Kabupaten Meranti karena selain mampu memenuhi kebutuhan lokal juga memiliki peran ekspor ke wilayah lainnya. Sektor/Kategori transportasi dan Pergudangan ini dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan pos dan kurir. Besarnya kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan pada PDRB Kabupaten Meranti pada Tahun 2014 sebesar 2,04% naik menjadi 2,30% pada tahun 2015. Tahun 2016 kontribusi sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan menjadi 2,29% dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 2,31%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor Transportasi dan pergudangan kembali mengalami penurunan sebesar 0,09% menjadi 2,22%. Penurunan kontribusi sektor Transportasi dan pergudangan ini tidak terlalu signifikan karena hanya terjadi sebesar 0,09%.



Gambar 5.3
Grafik Persentase Kontribusi Sektor Transportasi dan Perdagangan
Tahun 2014-2018

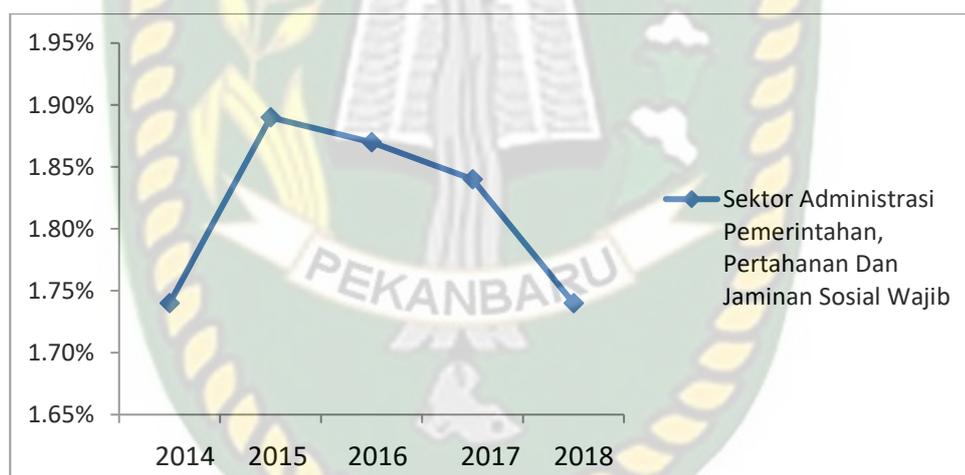
Sumber : Hasil Analisis, 2020

c. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor/Kategori (H) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor unggulan dengan nilai LQ = 1,201774. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib hanya memiliki satu golongan pokok. Kegiatan yang tercakup kedalam sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib yaitu kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib pada PDRB Kabupaten Meranti pada tahun 2014 – 2018 relatif stabil yaitu

berkisar diantara 1% - 2%. Kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib pada Tahun 2014 sebesar 1,74% naik menjadi 11,89% pada tahun 2015. Tahun 2016 kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan menjadi 1,87% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 1,84%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib kembali mengalami penurunan sebesar 0,10% menjadi 1,74%.



Gambar 5.4
Grafik Persentase Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2014-2018

Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.1.2. Analisis DLQ

Metode *Location Quotient* (LQ) mempunyai kelemahan yang harus diatasi, kelemahan LQ yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena sektor unggulan pada saat ini belum tentu tetap

menjadi sektor unggulan di tahun yang akan datang dan begitu juga sebaliknya, sektor non unggulan pada saat ini kemungkinan akan berubah menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang.

Metode DLQ adalah metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan posisi sektor perekonomian dimasa yang akan datang. Dalam artian bahwa suatu sektor yang ada pada saat ini terjadi sektor unggulan belum tentu akan menjadi sektor unggulan pada masa yang akan datang. Apabila nilai $DLQ = 1$, maka suatu sektor perekonomian tersebut merupakan sektor unggulan dimasa yang akan datang, sedangkan jika nilai $DLQ < 1$, maka suatu sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dimasa yang akan datang.

Dynamic Location Quotient adalah indeks yang merefleksikan laju pertumbuhan suatu sektor unggulan disuatu wilayah. Analisis DLQ ini akan memperlihatkan perubahan atau reposisi sektoral yang terjadi dalam suatu perekonomian wilayah studi selama kurun waktu tertentu (Wicaksono, 2011). Ma'ruf (2009) menjelaskan bahwa *Dynamic Location Quotient* merupakan model modifikasi dari analisis *Static Location Quotient* atau sering disebut *Location Quotient* (LQ), dengan melakukan akomodasi laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari periode analisis. Adapun rumus untuk menghitung analisis *Dynamic Location Quotient* adalah:

$$DLQ_{ij} = \frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)}$$

Sumber: Muta'ali, 2015

Keterangan:

DLQ_{ij} = Indeks *Dynamic Location Quotient* sektor i di kabupaten j

- g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor atau sub sektor i di kabupaten/kota j
 g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di kabupaten/kota j
 G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di tingkat Provinsi
 G = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi
 t = kurun waktu analisis

Tabel 5.2
Rata-Rata Laju Pertumbuhan

	SEKTOR	G_{ij}	G_i
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	7,68%	6,17%
B	Pertambangan Dan Penggalian	-1,71%	-4,91%
C	Industri Pengolahan	7,44%	6,92%
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	25,65%	20,02%
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	10,24%	5,39%
F	Konstruksi	8,30%	10,18%
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	9,97%	8,80%
H	Transportasi Dan Pergudangan	6,99%	9,66%
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	7,35%	6,44%
J	Informasi Dan Komunikasi	7,49%	9,64%
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	5,08%	5,82%
L	Real Estate	8,96%	8,34%
MN	Jasa Perusahaan	10,08%	10,15%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	4,69%	4,33%
P	Jasa Pendidikan	9,96%	8,95%
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	9,58%	10,62%
RSTU	Jasa Lainnya	7,59%	13,74%
	Rata- rata total laju pertumbuhan	8,55%	8,25%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dengan adanya perubahan atau reposisi sektoral yang nampak dari analisis, maka nantinya akan didapatkan sektor ekonomi mana saja yang mempunyai

potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan sektor yang sama diwilayah referensi dan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi perkembangannya lebih rendah dibandingkan sektor sama diwilayah yang ada di atasnya (daerah referensi) secara keseluruhan. Jika didalam penelitian ditemukan sektor ekonomi memiliki nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) lebih besar dari satu ($DLQ > 1$), maka sektor tersebut termasuk kedalam sektor ekonomi dengan potensi perkembangan lebih cepat dibandingkan sektor yang sama diwilayah referensi. Sebaliknya, jika didalam penelitian sektor yang dianalisis memiliki nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) lebih kecil dari satu ($DLQ < 1$), maka sektor tersebut termasuk kedalam sektor ekonomi dengan potensi perkembangan lebih rendah dibandingkan sektor sama diwilayah yang ada di atasnya (daerah referensi) secara keseluruhan. Berikut ini tabel yang menunjukkan nilai *Dynamic Location Quotient* (DLQ) setiap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Meranti selama periode 2014 sampai dengan 2018 :

Tabel 5.3
Hasil perhitungan Nilai DLQ

	SEKTOR	DLQ
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,87
B	Pertambangan dan Penggalian	0,84
C	industri Pengolahan	0,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,91
E	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,97
F	konstruksi	0,80
G	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,91
H	transportasi dan pergudangan	0,82
I	penyediaan akomodasi dan makan minum	0,90
J	informasi dan komunikasi	0,84
K	jasa keuangan dan asuransi	0,86
L	real estate	0,85
MN	jasa perusahaan	0,87
O	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,85
P	jasa pendidikan	0,85
Q	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,87
RSTU	jasa lainnya	0,73

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari table 5.3 diatas dapat diketahuio bahwa dari sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Meranti tidak ada sektor yang dapat diharapkan menjadi sektor unggulan di masa yang kan datang, dikarenakan setelah dianalisis dengan analisis DLQ nilai DLQnya < 1 . Sehingga menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut masih belum bisa diharapkan untuk menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang bagi Kabupaten Meranti. Untuk sektor terendahnya yaitu sektor jasa lainnya dengan nilai DLQ sebesar (0,73) yang

artinya sektor ini merupakan sektor yang tidak memiliki potensi perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pertanian Provinsi Riau.

Hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa di Kabupaten Meranti tidak terdapat sektor unggulan dari 17 lapangan usaha yang ada pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hasil ini lebih sedikit dari hasil analisis LQ yang menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2018 terjadi peningkatan dan penurunan laju pertumbuhan pendapatan pada PDRB Kabupaten Meranti sehingga dalam pengembangan wilayah Kabupaten Meranti nantinya digunakan data yang berdasarkan analisis LQ sedangkan analisis DLQ digunakan untuk melihat prospektifitas sektor unggulan dengan menggunakan analisis gabungan LQ dan DLQ (analisis Tipologi Sektor).

5.2. Mengidentifikasi Tipologi Sektor Unggulan Di Kabupaten Meranti

Pengembangan wilayah yang berbasis sektor unggulan haruslah memperhatikan tipologi dari sektor unggulan tersebut, sebab dalam pengembangan wilayah tujuannya adalah untuk menjadikan suatu daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga perlu diketahui apakah sektor unggulan tersebut prospektif atau tidak. Jika prospektif maka layak untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan wilayah, dan jika tidak prospektif maka dalam menyusun strateginya akan diarahkan agar laju pertumbuhan meningkat sehingga ditahun-tahun mendatang diharapkan dapat menjadi sektor yang prospektif. Dalam analisis tipologi sektor ini digunakan gabungan data dari analisis LQ dan DLQ

Tabel 5.4
Nilai Indeks/Koefisien *Location Questiont* (LQ) dan *Dynamic Location Questiont* (DLQ) menurut Lapangan Usaha

KATEGORI	SEKTOR	LQ	DLQ	Kategori
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	1,564805	0,87	Sektor Unggulan Tidak Prosfektif
B	Pertambangan Dan Peggalian	0,775535	0,84	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
C	Industri Pengolahan	0,961395	0,87	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,672228	0,91	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,359198	0,97	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
F	Konstruksi	0,526205	0,80	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0,915083	0,91	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
H	Transportasi Dan Pergudangan	2,610215	0,82	Sektor Unggulan tidak Prosfektif
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,533986	0,90	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
J	Informasi Dan Komunikasi	0,778659	0,84	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	0,322955	0,86	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
L	Real Estate	0,490488	0,85	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
M,N	Jasa Perusahaan	0,569958	0,87	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	1,201774	0,85	Sektor Unggulan tidak Prosfektif
P	Jasa Pendidikan	0,428161	0,85	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,354314	0,87	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,545682	0,73	Sektor Non Unggulan tidak Prosfektif

Sumber, Data Olahan, 2020

Berdasarkan table tersebut maka sektor – sektor akan dibagi dalam 4 tipologi berdasarkan indeks LQ dan DLQnya. Adapun hasil analisis tipologi sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 5.5
Tipologi Sektor

	DLQ>1	DLQ<1
LQ>1	Tipe I Sektor Unggulan Prospektif -	Tipe III Sektor Unggulan Tidak Prospektif <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Transportasi dan Pergudangan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
LQ<1	Tipe II Sektor Non Unggulan Prospektif -	Tipe IV Sektor Non Unggulan tidak Prospektif <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan Dan Penggalan • Industri Pengolahan • Pengadaan Listrik Dan Gas • Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang • Konstruksi • Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum • Informasi Dan Komunikasi • Jasa Keuangan Dan Asuransi • Real Estate • Jasa Perusahaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial • Jasa lainnya

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka sektor – sektor penyusun PDRB Kabupaten

Meranti pembagian tipologinya yaitu :

1. Tipe I (sektor unggulan, prospektif)
 - a. Tidak ada
2. Tipe II (sektor non unggulan, prospektif)
 - a. Tidak ada
3. Tipe III (sektor unggulan, tidak prospektif)
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - b. Transportasi dan Pergudangan
 - c. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
4. Tipe IV (sektor non unggulan, tidak prospektif)
 - a. Pertambangan Dan Penggalian
 - b. Industri Pengolahan
 - c. Pengadaan Listrik Dan Gas
 - d. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang
 - e. Konstruksi
 - f. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor
 - g. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
 - h. Informasi Dan Komunikasi
 - i. Jasa Keuangan Dan Asuransi
 - j. Real Estate
 - k. Jasa Perusahaan
 - l. Jasa Pendidikan

m. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial

n. Jasa lainnya

Dari pembagian tipologi diatas dapat dilihat bahwa 3 sektor unggulan yang ada semuanya merupakan sektor unggulan tidak prospektif dan yang lainnya merupakan sektor non unggulan dan tidak prospektif.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Meranti, provinsi Riau maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 17 lapangan usaha/ sektor yang ada di Kabupaten Meranti terdapat 3 sektor yang menjadi unggulannya yaitu Kategori (A) sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan, Kategori (H) sektor Transportasi dan Pergudangan serta Kategori (O) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
2. Berdasarkan tipologinya sektor – sektor unggulan tersebut semuanya termasuk kedalam tipe III yaitu sektor unggulan tidak prospektif.

6.2. Saran

Dari penelitian ini, saran yang ingin penulis berikan adalah pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Meranti sebaiknya lebih memperhatikan sektor – sektor apa saja yang diunggulkan di wilayahnya sehingga dapat memaksimalkan pengembangan wilayah, karena memanfaatkan sumberdaya eksisting dan mengoptimalkannya tentu akan lebih mudah daripada mengembangkan sumberdaya dari luar, selain biaya yang besar juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap wilayah lain. Pemerintahan Kabupaten Meranti

sebaiknya lebih memprioritaskan program-program yang terkait dengan sektor unggulan agar kegiatan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten Meranti khususnya.

Penelitian masih dapat dilanjutkan dengan penelitian terkait mengidentifikasi sektor unggulan di wilayah lain dengan sumberdaya yang berbeda maupun di Kabupaten Meranti seperti pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan, mengukur prioritas sektor unggulan ataupun penelitian yang terkait dengan sektor unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2013, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alwasilah, 2012, *Pokok Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Ambardi dan Prihawantoro, 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: P2KTPIJ-BPPT.

Amir, Amri, 2009, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, Bogor: IPB Press.

Arsyad, Lincoln, 2015, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Basuki, Mahmud dan Febri Nugroho, Mujiraharjo, 2017, *Jurnal: Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient*, Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol. 15 No. 1, ISSN 1693-2390.

Fachrurrazy, 2009, *Tesis: Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB*, Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Hidayat, M Erwin dan Rimadewi Supriharjo, 2014, *Jurnal: Identifikasi Sub Sektor Unggulan Kecamatan di Lombok Tengah*, Jurnal Teknik POMITS Vol. 3, No. 1, ISSN: 2337-3539.

Hidayat, Muhammad dan Ranti Darwin, 2017, *Jurnal: Analisis Sektor Potensial Dalam Memacu Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal LP2M-UMRI Vol. 2, ISSN: 2541-3023.

Irawati, Astri, 2016, *Skripsi: Analisis Spasial Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008-2014*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reforma Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, Bambang, 2016, *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal), Vol.4, No.1, ISSN 2354 – 905X.

Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE.

Mailendra, Puji Astuti, Mardianto, Rona Muliana, 2018, *The Regional Development Based on Leading Sectors in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Conference Proceedings CelSciTech-UMRI*, Vol. 3, ISSN: 2541-3023.

Mangilaleng, Ekaristi Jekna dan Debby Rotinsulu, Wensy Rompas, 2015, *Jurnal: Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 4.

Mulyanto, 2008, *Prinsip-Prnsi Pengembangan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muta'ali, Lutfi, 2015, *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*, Yogyakarta: BPPG.

Putra, Alfian Permana, 2010, *Skripsi: Konsep Pengembangan Industri Berbasis Pertanian dengan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Magetan*, Bandung: ITB.

Rachbini, Didik J., 2001, *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sambodo, Tri. M., 2002, *Jurnal: Analisis Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 10 No. 2.

Sapriadi dan Hasbiullah, 2015, *Jurnal: Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Iqtisaduna Vol.1 No. 1.

Sirojuzilam, 2008, *Jurnal: Disparitas Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara dan Kaitannya dengan Perencanaan Wilayah*, Jurnal Industri dan Perkotaan, Vol. XII No. 21.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono, 2015, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmako, Irawan M., 2010, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE.

Suryana, 2004, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Suyanto, 2000, *Analisa Ekonomik Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*,

Tambunan, Tulus, 2001, *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalian Indonesia.

Tan, Khee Giap, 2014, *Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah*, Singapore: World Scientific Publishing.

Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Todaro, P. Michael, 2010, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi, Komputer*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yulianita, Anna, 2009, *Jurnal: Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 7 No.2.

Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.